

**RELEVANSI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
DENGAN PEMBARUAN SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN**

Yusuf Agung Subekti  
Dosen STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang  
Yusuf.as@gmail.com

**Abstrak**

National Education System passed by in June 11, 2003, and entered into force in July 8, 2003, had the alignment toward existing Islamic education, pesantren. Since the modernization of Islamic education system in Indonesia was launched, actually that was influenced by both the Western and the Middle Eastern. There was less number of the like the Moslem boarding school could survive. Many classical Islamic boarding schools variously changed. Some totally evicted by the modern education system and other adopted any methodology of the modern education system. The last received very limited changes of modernization to survive. They changed by revising the system and methods. This article views National Education System as a reference in developing the Islamic education, pesantren as its renewal covers discrimination abolishment on education and justifies the relevance.

**Keywords;** national education system, education system renewal of *pesantren*

**Pendahuluan**

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam Tertua di Indonesia, selalu mengalami transformasi mengikuti tantangan zamannya, visi dan misi pesantren tergambar dari out put santri alumninya, yang mana civitas akademika Pesantren hadir ditengah masyarakat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan masyarakat tidak bisa terlepas sebagai bagian dari masyarakat dan berusaha menjawab kebutuhan pada eranya.

Meskipun masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai bentuk penggambaran sunatullah sebagai mana yang selalu terjadi sebagai dinamika sejarah, maka pesantren akan selalu berusaha mengikuti perubahan dan tetap menjadi bagian dari masyarakat.

Ketika penguasa berubah, budaya berubah, kebutuhan masyarakat berubah, maka pesantren secara reflektif juga secara adaptif menyerap perubahan tersebut. Sehingga ketika penguasa baru menerapkan aturan, perundang-undangan yang berkaitan pendidikan yang baru, ini juga menjadi salah satu faktor dominan dalam perubahan kurikulum serta hubungan relasional dipesantren.

Dalam konteks Nusantara dan Nasional, setelah era kerajaan selesai, lalu kolonial dan kini perkembangan dunia telah melahirkan suatu kemajuan zaman yang disebut era modern. Perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosio-kultural seringkali membentuk pada aneka kemapanan dan berakibat pada keharusan untuk mengadakan usaha kontekstualisasi bangunan-bangunan sosio-kultural dengan dinamika modernisasi, tak terkecuali dengan sistem pendidikan pesantren. Mengingat setiap era dan penguasa politik hampir pasti mempunyai sistem pendidikan nasional yang diberlakukan, maka sistem pendidikan pesantren harus selalu melakukan upaya rekonstruksi pemahaman tentang ajaran-ajarannya agar tetap relevan dan *survive*.

Keharusan untuk mengadakan rekonstruksi ini sesungguhnya sudah dimaklumi. Dunia pesantren telah memperkenalkan sebuah kaidah yang sangat populer : *"al-muhafadhah 'ala al-qadim ash-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah"* (membina budaya-budaya klasik yang baik dan terus menggali budaya-budaya baru yang lebih konstruktif). Kaidah ini merupakan legalitas yang kuat atas segala upaya rekonstruksi. Kebebasan membentuk model pesantren merupakan keniscayaan, asalkan tidak terlepas dari bingkai al-ashlah (lebih baik). Begitu pula, ketika dunia pesantren diharuskan mengadakan rekonstruksi sebagai kosekuensi dari kemajuan dunia modern, maka aspek al-ashlah menjadi kata kunci yang harus dipegang. Pesantren modern berarti pesantren yang selalu tanggap terhadap perubahan dan tuntutan zaman, berwawasan masa depan, selalu mengutamakan prinsip, efektifitas, efisien dan sejenisnya.

### **Sistem Pendidikan Nasional**

Sebagaimana diketahui pendidikan yang berkembang menjelang kemerdekaan dalam bentuk dikotomi, dengan menonjolkan sekolah umum yang bercorak sekuler dan tersisihnya sekolah-sekolah yang bercorak agama. Dualisme sistem pendidikan tersebut melahirkan dua perbedaan pandangan politik. Dalam upaya mewujudkan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, maka diadakanlah UU No. 4 Tahun 1950 yang mengatur dasar-dasar pendidikan dan pengajaran diwilayah

RIS, UU No. 12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya pendidikan nasional dalam NKRI

Dalam perkembangan selanjutnya untuk mengakomodasi amanat UUD 1945 tentang sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia, maka ditetapkanlah UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Gerakan reformasi tahun 1998 dan menuntut adanya reformasi dalam bidang pendidikan. Tuntutan reformasi tersebut dipenuhi oleh DPR bersama Pemerintah untuk penyempurnaan dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989, maka ditetapkanlah UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada tanggal 11 Juni 2003.<sup>1</sup>

Perundang-undangan diatas kemudian diimplementasikan dengan diikuti pembuatan kurikulum yang berlaku secara nasional, sehingga kita dalam sejarah pernah mengenal, CBSA, KTSP, KBK, dan yang terbaru sedang diimplementasikan adalah Kurikulum Nasional 2013, berikut sistem pengevaluasian dan pengujian untuk standarisasi mutu pendidikan secara Nasional yang kita kenal dengan adanya Unjian Nasional. Adapun apa yang dimaksud sebagai sistem Pendidikan Nasional secara lebih terperinci sebagai berikut;

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional dikemukakan Pendidikan Nasional adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Sebagai suatu sistem, pendidikan nasional mempunyai tujuan yang jelas, seperti yang dicantumkan pada undang-undang pendidikan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional itulah dilaksanakan proses pendidikan di Indonesia. Setiap lima tahun sekali biasanya ditetapkan tujuan pendidikan nasional itu dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dijelaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)<sup>2</sup>. Zahar Idris (1987) mengemukakan bahwa "Pendidikan Nasional sebagai suatu system

---

<sup>1</sup> Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam UU Sisdiknas* (Jakarta : Ditjen kelembagaan Agama Islam Depag, cet III, 2003), 1.

<sup>2</sup> Umar Tirtaraharja dan La sula. *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Departemen P& K dan Rineka Cipta), 249.

adalah karya manusia yang terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai hubungan fungsional dalam rangka membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang sesuai dengan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945<sup>3</sup>.

Untuk saat ini tujuan pendidikan Negara Indonesia yakni tertera dalam UU NO 20 tahun 2003 tentang Sispnas. dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat.

Apa yang tertera dalam UU Sisdiknas terkejawantahkan dalam Kurikulum Nasioanal, yang mana Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu pendidikan, bersifat Dinamis dan terbuka untuk pengembangan, sehingga semua yang menyangkut tujuan, isi, Media, strategi, proses dan evaluasi diarahkan demi tercapainya tujuan Sisdiknas.

Setelah membahas sistem pendidikan Nasional, jika ditautkan dengan pendidikan dan Keagamaan secara nasional tentu kita bertanya, dimanakah posisi pendidikan Agama dalam sistem pendidikan Nasional kita? Juga dimanakah posisi pesantren dalam SISDIKNAS?.

Pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan dalam penetapan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, termasuk sebagai implikasinya sekarang sudah ada beberapa Pesantren telah diakui jenjang kesetatarannya dengan jenjang-jenjang sekolah formal keagamaan nasional, sebut saja semacam Pesantren Darussalam Gontor, Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo, Al-Falah Ploso dan lain-lain, dalam keunikannya, pesantren mempunyai tantangan dan permasalahan untuk tetap eksis ditengah segala perubahan termasuk adanya sistem pendidikan Nasional. Dan tentu saja hal ini tidak serta merta terjadi namun berkat adanya berbagai transformasi pada sistem pendidikan Pesantren dan Pemahaman Kebutuhan pendidikan Agama oleh negara.

---

<sup>3</sup> Zahara Idris, *Dasar-Dasar Kependidikan* (Padang: Angkasa Raya 1987), 23.

## Sistem Pendidikan Pesantren

Secara garis besar bahwa sistem pendidikan terdiri atas dua unsur yaitu: Unsur *organik* dan unsur *anorganik*.<sup>4</sup> Unsur *organik* meliputi: Para pelaku pendidikan, pimpinan, guru dan pengurus. Sedang unsur *anorganik* meliputi: Tujuan, filsafat, tata nilai, kurikulum dan sumber belajar, proses kegiatan belajar mengajar, penerimaan murid dan tenaga kependidikan, teknologi pendidikan, dana, sarana, evaluasi dan peraturan terkait lainnya di dalam mengelola sistem pendidikan.

Sistem pendidikan pesantren tidak seperti sistem-sistem pendidikan umum. Pada pokoknya seluruh pesanten berangkat dari sumber yang sama, yaitu ajaran Islam. Yang membedakan diantara pesantren satu dengan lainnya ialah pada aspek filosofis dalam memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Islam pada bidang pendidikan sesuai dengan kondisi budaya masyarakat yang mengelilinginya. Perbedaan-perbedaan itu pada dasarnya berpulang pada perbedaan pandangan hidup kyai yang memimpin pesantren tersebut mengenai konsep: teologi, manusia, kehidupan, tugas dan tanggung jawab manusia terhadap kehidupan dan pendidikan. Dalam kenyataannya masing-masing pesantren mempunyai ciri khas sendiri-sendiri yang berbeda satu dari yang lain, sesuai dengan tekanan bidang studi yang ditekuni dan gaya kepemimpinan yang dibawakannya.

Sistem pendidikan pesantren dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>5</sup>

- A. Aktor atau pelaku: Kyai, ustadz, santri dan pengurus
- B. Sarana perangkat keras: Masjid, pondok atau asrama santri, rumah kyai, gedung sekolah atau madrasah, lahan untuk: olah raga, pertanian, peternakan, kerajinan dan sebagainya.
- C. Sarana perangkat lunak: Tujuan, kurikulum, kitab, tata tertib, perpustakaan, pusat dokumentasi dan penerangan, cara pengajaran (*sorogan, bandongan, halaqah*), ketrampilan, pusat pengembangan masyarakat dan alat-alat pendidikan lainnya.

Kelengkapan unsur-unsur tersebut berbeda-beda di antara pesantren yang satu dan pesantren yang lain. Ada pesantren yang secara lengkap dan dalam jumlah yang besar memiliki unsur-unsur tersebut, dan ada pula pesantren yang hanya memiliki unsur-unsur tersebut dalam jumlah yang terbatas.

Salah satu pluralitas dalam Islam terlihat dalam lembaga pendidikan pesantren. Pesantren tampil sebagai lembaga pendidikan Islam yang

---

<sup>4</sup> Mastuhu, *Dinamika Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), 19.

<sup>5</sup> Soedjoko Prasodjo dkk., *Profil Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1973)

mempunyai karakter atau profil unik, bahkan antara pesantren yang satu dengan yang lain cenderung memiliki ciri khas tersendiri, meskipun visi kelembagaannya sama. Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan dakwah berfungsi melestarikan dan mengembangkan ajaran Islam dalam masyarakat. Menurut Martin Van Bruinessen alasan pokok munculnya pesantren adalah untuk mentransmisi Islam tradisional sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang ditulis beberapa abad lalu. Kitab-kitab ini dikenal di Indonesia sebagai "kitab kuning". Jumlah kitab klasik yang diterima di pesantren sebagai ortodoks (*Al-Kutub Al-Mu'tabarah*) pada prinsipnya terbatas. Ilmu yang bersangkutan dianggap sesuatu yang sudah bulat dan tidak pernah ditambah, hanya bisa diperjelas dan diperjelas kembali.<sup>6</sup> Zamakhsyari Dhofier menyatakan bahwa pesantren merupakan kerangka sistem pendidikan Islam tradisional di Jawa dan Madura yang bertujuan melestarikan dan mengembangkan Islam di masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam melestarikan dan mengembangkan Islam di masyarakat ini, pesantren mempunyai pola transmisi yang cukup unik dan dianggap sebagai tradisi agung (*great tradition*), karena tujuan pokok pendidikan di pesantren bukanlah untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang dan keagungan duniawi, tetapi ditanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Allah, sedangkan cita-cita pendidikan pesantren adalah untuk dapat berdiri sendiri (mandiri), tidak menggantungkan kepada orang lain, kecuali kepada Tuhan. Hal semacam ini selalu ditanamkan oleh para kyai dan guru-gurunya. Hingga tidak mengherankan jika ikatan emosional antara santri dan guru sangat kuat.<sup>8</sup>

### **Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan**

Pada awal sejarahnya, pesantren lebih banyak merupakan pusat kegiatan tarekat. Disamping amalan-amalan tarekat, pusat-pusat pesantren juga mengajarkan kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan agama Islam kepada sejumlah pengikut-pengikut inti.<sup>9</sup> Pesantren sebagai sentra-sentra kajian kitab dan menjadi pusat kegiatan tarekat ini tidak bisa dipisahkan antara keduanya, karena saling menunjang.

Berkaitan dengan penyebaran Islam, para ulama yang memangku pondok pesantren mendirikan masjid di tengah-tengahnya, mengajarkan

---

<sup>6</sup> Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. (Jakarta Mizan 1995), 17.

<sup>7</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES 1985), 15.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 23.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 34.

agama Islam dengan menggunakan kitab Al-Quran dan kitab-kitab lain yang memuat berbagai ilmu dan fak, mengajarkan ibadah dan amal shaleh. Pesantren telah mengalami perubahan dari dalam dan selanjutnya dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam dengan ciri khas Indonesia.<sup>10</sup> Bahkan Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan Nasional dan sebagai menteri pendidikan pengajaran dan kebudayaan RI yang pertama, menyatakan bahwa pondok pesantren merupakan dasar pendidikan nasional, karena sesuai dan selaras dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.<sup>11</sup>

Pesantren mempunyai akar sejarah yang panjang, sekalipun pesantren-pesantren besar yang ada sekarang hanya bisa dilacak asal-usulnya sampai akhir abad ke-19 atau abad ke-20. dalam hal ini Zamakhsyari Dhofier sebagaimana dikutip oleh Kuntowijoyo, telah membuat peta kekuatan pesantren-pesantren di Jawa dari abad ke-19 dan abad ke-20 yang menunjuk adanya 40 pemusatan pesantren di Jawa Timur sebagai pemegang jumlah terbesar, diikuti secara berurutan oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat.<sup>12</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, sejak pertengahan abad ke-19 mulai muncul para generasi muda muslim pergi ke Makkah dan Madinah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka. Bahkan diantara mereka ada yang bermukim lama disana menjadi ulama terkenal. Keterlibatan para ulama ini sekembalinya dari Makkah akan mempengaruhi watak keislaman masyarakat di Jawa bahkan di Indonesia umumnya. Sehingga secara bertahap pada gilirannya umat Islam Indonesia mampu melakukan pembaharuan dan perubahan.

Perubahan penting terjadi pada tahun 1910 M. dengan dipelopori oleh pesantren-pesantren tua di Jawa, dan selanjutnya pada tahun 1960 M telah banyak pesantren-pesantren mulai mengajarkan pelajaran umum, seperti: bahasa Indonesia, bahasa Belanda, berhitung, ilmu bumi dan sejarah, dalam hal ini sistem madrasah (klasikal) sudah mulai diperkenalkan.<sup>13</sup> Gerakan pembaharuan pesantren merupakan jawaban positif para kyai terhadap perubahan-perubahan sebagai akibat politik Belanda di Indonesia sejak akhir abad ke-19 M.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> A. Timur Djailani, *Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Pengembangan Perguruan Agama* (Jakarta: Dermaga, tt), 51.

<sup>11</sup> Alamsyah Ratu Perwiranegara. *Pembinaan Pendidikan Agama* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1992), 41.

<sup>12</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

<sup>13</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren..*, 30.

<sup>14</sup> Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai* (Malang: Kalimasada Press, 1993), 40.

Hasil positifpun mulai dirasakan dari masuknya sistem sekolah (klasikal) ke dalam pondok pesantren. Hal ini merupakan keberhasilan para kyai dalam mengkonsolidasikan kedudukan pesantren dalam menghadapi sekolah-sekolah Belanda. Maka pada dasawarsa 1920-1930 jumlah pesantren besar dan santri-santrinya melonjak berlipat ganda. Suatu survey diselenggarakan oleh kantor urusan agama yang di bentuk oleh pemerintah militer Jepang di Jawa pada tahun 1942-1945, mencatat bahwa pada tahun 1942 jumlah pesantren dan madrasah di Jawa sebanyak 1.871 dan santri sebanyak 139.415 orang.<sup>15</sup> Menurut laporan ini, jumlah murid lembaga-lembaga pendidikan Islam jauh lebih banyak dari mereka yang terdaftar pada sekolah-sekolah yang dikembangkan Belanda.

Pengaruh dominan dari pesantren mulai menurun secara drastis setelah penyerahan kedaulatan pada bulan Desember 1949 dimana pemerintah Indonesia pada gilirannya mengembangkan sekolah umum seluas-luasnya dan memberikan fasilitas utama pada bangsa Indonesia yang terdidik dalam sekolah umum tersebut untuk menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Selanjutnya asumsi dasar masyarakat tentang sekolah dikaitkan dengan penyediaan lapangan kerja, bahkan sejak itu ada kecenderungan bahwa sekolah umum itulah satu-satunya lembaga tempat belajar sehingga mereka yang tidak bersekolah dianggap tidak berpendidikan. Sehingga masyarakat elit kota seakan risih bila memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Tudingan-tudingan yang bernada sinisme bermunculan, bahwa pesantren adalah ketinggalan zaman, kuno, sebagai departemen kutu kudis, pesantren diidentikkan sebagai pusat pikiran (*centre of thinking*) yang berbau tradisional dan konservatif.

Fenomena ini mengakibatkan anak muda yang tertarik oleh pendidikan pesantren semakin menurun dibanding mereka yang mengikuti sekolah umum. kebanyakan pesantren-pesantren kecil mati dalam tahun 1950-an, sedangkan pesantren besar yang dapat bertahan setelah menyesuaikan diri dengan menyelenggarakan pendidikan umum di dalamnya.<sup>16</sup>

Dunia pesantren terdengar lagi gaungnya ketika Menteri Agama, Prof. Dr. Mukti Ali, MA menggugah masyarakat pesantren untuk menambah bekal para santri dengan aneka macam ketrampilan dan pengetahuan

---

<sup>15</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren...*, 40.

<sup>16</sup> Abdur Rahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren* (Jakarta: Darma Bakti, tt), 41.



berdasarkan SKB tiga menteri dalam pelaksanaan kurikulum dan penentuan ijazah bagi madrasah dengan sekolah sederajat.<sup>17</sup>

Namun demikian, tidak semua pesantren mengalami perubahan yang sama, karena di pesantren tidak ada aturan kebijaksanaan yang seragam. Masing-masing memiliki otonomi tersendiri untuk mengaturnya. Secara garis besar, ada 2 typologi pondok pesantren, yaitu:

- Pertama: Pesantren Salafi yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam Klasik sebagai inti pendidikannya. Sistem madrasah diterapkan untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa pengenalan pengetahuan umum (kalau ada, itupun sangat terbatas). Model seperti ini lazim disebut Madrasah Diniyah, seperti: pondok Lirboyo, Pondok Ploso (Kediri), pondok Maslakhul Huda (Pati), Pondok Tremas (Pacitan) dan lain sebagainya.

- Kedua: Pesantren Khalafi yaitu pesantren yang telah memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam madrasah-madrasah yang dikembangkannya, atau membuka sekolah-sekolah umum dalam lingkungan pesantren. Pondok Gontor misalnya, tidak lagi mengajarkan kitab-kitab Islam Klasik. Pesantren-pesantren besar seperti Tebuireng dan Rejoso di Jombang telah membuka SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi, namun di sisi lain masih mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam Klasik.<sup>18</sup>

Perkembangan terakhir ini menarik untuk dicermati, yaitu bahwa terjadinya perubahan dalam dunia pesantren, akan mempengaruhi keseluruhan sistem tradisinya, baik sistem kemasyarakatan, agama maupun pandangan hidup, baik yang bersifat micro-cosmos. Hegemonitas kultural dan keagamaan akan semakin menurun, sesuai dengan keanekaragaman dan kompleksitas perkembangan masyarakat. Perkembangan pesantren itu tidak bisa dipisahkan dengan sosok kyai yang memimpinya. Oleh karena itu, sebagai seorang arsitek kemasyarakatan, kyai dituntut hendaknya mampu membaca selera masyarakat dan bahkan ia harus mampu menjadi pelopor kemajuan.

Dari penjelasan diatas, nampaknya potensi seorang kyai dalam mengadakan pembaharuan adalah penuh dengan kehati-hatian, sehingga ia akan mengadakan perubahan apabila memang hal itu benar-benar ada manfaatnya bagi kehidupan masyarakat dan selalu dikaitkan dengan kesiapan masyarakat sebagai obyek yang akan menerima perubahan tersebut.

---

<sup>17</sup> Moh. Hasyim Munif, *Pondok Pesantren Dalam Kancah Kemerdekaan dan Pembangunan Pedesaan* (Surabaya: Sinar Wijaya, 1992), 4.

<sup>18</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren...*, 41.

Fenomena inilah yang merangsang kyai untuk selalu mengadakan pembaharuan dalam pesantrennya, dan kebanyakan pembaharuan tersebut dengan tetap mempertahankan elemen-elemen tradisional manakala dianggap masih relevan, disamping itu tentu saja melakukan perombakan-perombakan yang sifatnya baru sama sekali, manakala hal itu dinilai lebih "ashlah".

### **Pembaharuan Pendidikan Di Pondok Pesantren**

Pada permulaan abad ke-20 terjadi beberapa perubahan dalam Islam di Indonesia yang pada garis besarnya dapat digambarkan sebagai kebangkitan, pembaharuan, bahkan pencerahan (*renaissance*). Salah satu dorongan timbulnya perubahan tersebut adalah berasal dari pembaharuan pendidikan Islam. Karena cukup banyak orang dan organisasi Islam tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari Quran dan studi agama, maka pribadi-pribadi dan organisasi Islam pada permulaan abad ke-20 ini berusaha memperbaiki pendidikan Islam, baik dari segi metode maupun isinya. Mereka juga mengusahakan kemungkinan memberikan pendidikan umum untuk orang Islam.<sup>19</sup>

L. Stoddard, dalam *The new world of Islam* yang berisi garis besar sejarah Islam modern, menyebutkan bahwa tokoh dan organisasi penting dalam Islam di Indonesia pada permulaan abad ke-20 ini terbagi menjadi 2 kelompok besar yaitu (1) *gerakan salaf* (gerakan dari orang-orang terdahulu yang ingin kembali pada rel ulama salaf). Gerakan ini juga dinamakan *gerakan reformis* yang berusaha keras mengembalikan ajaran Islam pada relnya kaum salaf, kembali kepada Qur'an dan Sunnah, mengikis habis *bid'ah*, *khurafat*, *tahayyul* serta *klenik*, membuka terus pintu *ijtihad* dan menolak membabi buta dalam gelapnya taklid. Kelompok ini adalah Jam'iyatul khair, Al-Irsyad, Jong Islamieten Bond, Persatuan Islam dan Muhammadiyah. (2) *Gerakan modernis* yang tidak menyetujui pandangan kritis terhadap sejarah Islam seta tidak merasa perlu kembali secara langsung kepada pokok ajaran Islam Qur'an Hadis sebagaimana yang diinginkan oleh gerakan salaf, namun mereka menganggap bahwa kembali kepada Qur'an dan Hadits harus melalui penafsiran ulama salaf. Gerakan modernis ini semata-mata hanya mengharapkan perubahan luar, perubahan yang bersifat sosial kultural dan politik ekonomis, bukan jiwa ajarannya, malahan mereka masih memelihara apa yang didapatnya dari ulama-ulama terdahulu. Gerakan modernis yang dibicarakan di sini adalah Nahdlatul Ulama, Perti, Jam'iyatul Wasliyah, dan Persatuan Umat Islam Majalengka.

---

<sup>19</sup> Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah, Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern* (Jakarta PT. Pustaka LP3ES Indonesia, cet II, 1994), 28.

Definisi pembaharuan menurut Nur Cholis Madjid adalah proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak atau kurang *akliyah* dan menggantinya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang *akliyah*. Sedang kegunaan pembaharuan ini adalah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal. Pembaharuan menurutnya identik dengan modernisasi dan nasionalisasi, yakni berfikir dan bekerja menurut *fitrah* atau *sunnatullah*.<sup>20</sup>

Istilah pembaharuan atau modernisasi adalah merupakan suatu wacana yang mengawali perubahan mendasar bagi pendidikan Islam sebagai suatu ajaran. Dalam khazanah masyarakat barat, pembaharuan mengandung makna pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.<sup>21</sup> Namun pembaharuan dalam Islam mengandung konotasi adanya transformasi nilai yang mesti berubah, bahkan ada kalanya diperlukan perombakan-perombakan terhadap struktur yang sudah ada dan dianggap baku. Tanda-tanda perubahan itu terlihat secara transparan, seperti dari statis menjadi dinamis, dari tradisional-ortodoks menjadi rasional-ilmiah, dari fanatik menjadi luwes-demokratis dan seterusnya. Einterpetasi ajaran-ajaran Islam perlu dilakukan, agar nilai-nilai yang sudah baku tidak membeku dan statis, Islam selalu menuntut adanya perubahan dan pembaharuan wawasan bagi para pemeluknya di berbagai bidang dengan tolak ukur yang benar.

Menurut Arkoun dalam bukunya "*Islam et modernite*", ada dua kutub yang harus diperhatikan dalam rangka melihat modernitas yakni (a) kutub lama yang kuno, tradisional dan klasik. (b) kutub masa depan, yang inovatif, berorientasi ke depan, berkeputusan dengan cakrawala yang jauh. Antara keduanya terdapat keterkaitan sedemikian rupa, tidak terputus dari kutub lama yang tradisional. Dari yang tradisional akan menjadi modern, dan yang modern dalam perjalanan masa akan menjadi tradisional, demikian seterusnya.<sup>22</sup>

Dalam upaya melakukan pembaharuan pemikiran pendidikan Islam tradisional (pesantren), tentu akan muncul berbagai persoalan-persoalan baru

<sup>20</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Kemoderenan dan Ke-Indonesiaan* (Bandung: Penerbit Mizan 1988), 172.

<sup>21</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, cet I, 1975), 11.

<sup>22</sup> Suadi Putro, *Mohammed Arkoun: Tentang Islam dan Modernitas* (Jakarta: Paramadina 1998), 32.

yang merupakan akibat dari dampak positif dan negatif yang ditinggalkannya pola lama beralih pada ditepkannya pola baru, atau konvergensi dari keduanya. Dalam hal ini Azyumardi Azra memprediksi munculnya kecenderungan-kecendeungan itu sebagai berikut:

*Pertama*, munculnya konflik antara tradisi pemikiran dan pendidikan Islam dengan modernitas. Ciri-ciri modernitas sering tidak cocok dengan paradigma atau pemikiran pendidika Islam tradisional. Misalnya, paradigma modernitas itu bertitik tolak pada nasionalitas, individualitas, kajian-kajian atau *inquiry scientific* yaitu penelitian kajian ilmiah dan bahkan skeptisisme Mupun profesionalisme yang lebih menekankan pada lapangan kerja, pada penciptaan atau penemuan lapangan kerja setelah seseorang menamatkan pendidikannya. Sementara dalam tradisi Islam, pekerjaan bukan merupakan hal yang penting, yang penting adalah *thalabul ilm*-nya. Jadi bagaimana kita menuntut ilmu, pekerjaan nanti datang sendiri.

Dalam konteks Indonesia, krisis ini paling jelas dapat dilihat di pesantren. Pesantren paling jelas krisis akibat konflik antara tradisi pemikiran dan praktik pendidikan Islam dengan modernitas. Konflik atau krisis ini dikalangan pesantren atau orang-orang yang *concern* terhadap pesantren dapat menghilangkan identitas pesantren itu sendiri. Selama opini yang berkembang, bahwa pesantren dikenal sebagai tempat *reproduksi ulama*, tempat melahirkan para ulama.

Di pesantrenlah tempat yang sesungguhnya untuk melahirkan ulama, ia tidak bisa dilahirkan dari IAIN, misalnya, apalagi perguruan tinggi umum. Tapi proses reproduksi ulama di pesantren belakangan ini menjadi tanda tanya besar, karena adanya usaha-usaha untuk melakukan modernisasi, usaha-usaha untuk melakukan pembaharuan agar sesuai dengan paradigma modernitas yang dikembangkan oleh pemerintah.

Hal tersebut kemudian mendorong munculnya apa yang disebut misalnya pesantren pertanian, pesantren peternakan, dan lain sebagainya. Lalu, pesantren ini maunya apa? Apa mau jadi *korporasi* tambak udang atau melahirkan ulama?

Inilah yang menjadi pertanyaan bagi para pengamat pendidikan pesantren. Dalam hal ini, lebih tepat jika pesantren tetap memelihara identitasnya, yaitu mereproduksi memunculkan ulama. Jadi tidak perlu dipaksakan untuk menjadi pesantren pertanian dan lain sebagainya. Sebab ulama tidak bisa diharapkan akan lahir dari lembaga-lembaga selain pesantren. Artinya bahwa krisis yang muncul akibat konflik antara tradisi pemikiran dan praktik pendidikan Islam itu juga belum terselesaikan di Indonesia sampai sekarang.

*Kedua*, munculnya krisis metodologi atau krisis paedagogik. Sekarang ini semakin tinggi kecendeungan di kalangan lembaga-lembaga pendidikan Islam, bahwa yang terjadi adalah lebih merupakan *proses teaching*, proses pengajaran, ketimbang *proses learning*, proses pendidikan. Proses pengajaran hanya mengisis aspek kognitif atau intelektual, tapi tidak mengisi aspek pembentukan pribadi dan watak. Hal ini terjadi akibat dari pergeseran-pergeseran di dalam konsep pendidikan itu sendiri. Pendidikan tidak lagi dipahami sebagai proses *life long education*, proses pendidikan terus meneus atau proses di mana upaya menuntut ilmu, upaya meningkatkan kecerdasan, tidak hanya sekedar pengisian intelektual, tapi juga pembentukan kepribadian dan watak.

Isu seperti itu menjadi sangat relevan dengan zaman sekarang yang sering disebut zaman pasca-modernisme (posmodernisme), suatu masa dimana globalisasi mengakibatkan semakin tingginya diskolasi kekacauan sosial atau juga *displacement*, banyak orang yang tersingkir atau juga alenasi dan lain sebagainya. Justru pembentukan watak ini menjadi sangat penting. Orang-orang yang berkepribadian kuat, yang berkarakter, akan lebih tangguh menghadapi globalisasi ataupun dampak-dampak negatifnya.

Inilah yang semakin kurang di dalam sistem pendidikan Islam, bahwa kita ini semakin sangat formal pendidikannya, hanya menekankan aspek pengajaran, sementara aspek learningnya, aspek pembentukan kepribadiannya terabaikan. Karenanya, pesantren diharapkan mempertahankan bahwa proses pengajaran yang belangsung itu lebih merupakan *learning*, lebih merupakan *ta'lim* ketimbang tarbiyah. Tarbiyah itu lebih formal, sedang *ta'lim* itu luas pengertiannya, yakni bahwa proses pengajaran dan pendidikan merupakan proses inkulturasi, proses pembudayaan anak didik, proses pembudayaan orang-orang yang lebih terlibat di dalam masyarakat.<sup>23</sup>

### **Perspektif Sistem Pendidikan Pondok Pesantren**

Bahwa gerak perjuangan pondok pesantren di dalam memantapkan identitas dan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan berbangsa, sebagai sub sistem pendidikan nasional, ia makin mantap dan kukuh kedudukannya serta semakin besar peran dan sumbangannya dalam memenuhi kebutuhan nasional melalui upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional, akan semakin jelas identitasnya dan oleh kaenanya akan semakin dinamis gerak

---

<sup>23</sup> Azyumardi Azra, *Rekonstruksi Kritis Ilmu dan Pendidikan Islam, Dalam: Abdul Munir Mul Khan, dkk. Religiusitas Iptek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet 1, 1998), 83-85.

perjuangannya. Hal yang demikian ini akan tercapai jika pesantren mampu mempertahankan identitasnya di satu pihak dan terbuka bagi kemajuan ilmu dan teknologi di pihak lain, dalam rangka mencapai cita-cita nasional.

Sistem pendidikan pesantren terdiri atas unsur-unsur dan nilai-nilai yang merupakan satu kesatuan. Kualitas dari sistem pendidikan pesantren sangat tergantung pada kualitas para pengasuhnya dan bobot interaksi antara unsure-unsurnya, terutama orientasi unsur-unsur organiknya atau para pelakunya dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dapat disimpulkan bahwa, pondok pesantren telah mampu mempertahankan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat dari zaman ke zaman. Pada periode awalnya ia berjuang tampil dengan membawa misi agama tauhid untuk melawan kemusyrikan dan tahayyul. Setiap kehadiran pesantren baru selalu diawali dengan “perang nilai” antara “nilai putih” yang dibawa oleh pesantren dan “nilai hitam” yang ada di masyarakat setempat, diakhiri dengan kemenangan pesantren. Bentuk dan sifat pesantren pada waktu itu: sebagai lembaga pendidikan, sosial dan dakwah dengan sifat pendidikan dan pengajaran yang didominasi oleh pikiran fiqih dan tasawuf dari abad ke-7 sampai 13 Masehi, dengan kitab-kitab keagamaan yang berorientasi pada fikih dan kesufian.<sup>24</sup> Hal ini bisa dibuktikan melalui cerita-cerita tutur yang berkembang dilingkungan dunia pesantren bahwa hampir semua kyai pendiri dan pengasuh pondok pesantren memiliki cerita-cerita legendaris lengkap dengan kesaktian-kesaktian badaniyah dan misteri kekuatan batiniyah yang luar biasa, disamping memiliki ilmu agama yang tinggi untuk melawan kekuatan-kekuatan hitam dan kebodohan masyarakat terhadap agama. Keberhasilan demi keberhasilan diraih oleh pesantren sehingga ia memperoleh tempat bagi masyarakatnya. Pada skala nasional, pesantren telah memperoleh pengakuan sebagai lembaga pendidikan yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, setidaknya dilingkungan mayoritas umat Islam Indonesia yang juga merupakan golongan mayoritas dari bangsa Indonesia.

Kemudian dalam periode zaman penjajahan, pesantren tetap eksis dalam tata kehidupan masyarakat muslim dengan posisi *uzlah* yaitu memisahkan diri dari tata kehidupan pemerintahan kolonial pada umumnya. Karena pemerintah kolonial takut pada perkembangan Islam di Indonesia, dan keadaan pendidikan pesantren juga dilihat dari kaca mata pemerintah kolonial sangat jelek, sehingga sulit dimasukkan ke dalam sistem pendidikan

---

<sup>24</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), 147.

pemerintah. Tidak jelas batas-batas antara lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan lembaga penyiaran agama (dakwah), dan pekerja sosial keagamaan.<sup>25</sup> Tulisan bahasa arab sebagai bahasa yang dipergunakan dan dipelajari dalam pesantren sangat berbeda dan sulit dipadukan dengan tulisan latin yang dipergunakan dalam sistem pendidikan pemerintah. Tulisan Arab dimulai dari kanan sedang tulisan latin mulai dari kiri. Tidak jelas tujuan kurikulum, serta evaluasinya dan sebagainya. Akhirnya posisi pesantren tetap berada di luar sistem pendidikan pemerintah. Dalam keadaan *uzlah* tersebut, pesantren tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga untuk memperdalam ajaran agama yang bercorak *fiqih-sufistik*. Pesantren diliaang mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan keduniaan kecuali yang menyangkut hukum waris (*faraid*). Hal tersebut membawa keuntungan dan kerugian sekaligus bagipesantren. Keuntungannya ialah pesantren berhasil menjadi lembaga pendidikan yang mengembangkan pertahanan mental-spiritual, solidaitas dan kesederhanaan hidup. Tetapi kelemahannya adalah bahwa pendidikan pesantren bagaikan lepas dari kehidupan nyata, tidak mendarat di bumi, karena orientasi kehidupannya terlalu berat ke akhirat dan kurang memperhatikan kepentingan hidup duniawi. Sampai sekarang warna orientasi yang demikian ini masih dapat dilihat dengan jelas.

Kemudian datang zaman pergerakan dan persiapan perang kemerdekaan. Seiring dengan semakin "matangnya waktu" pesantren yang pada awalnya merupakan pusat pemurnian ajaran agama dan kepercayaan, berubah menjadi salah satu pusat perjuangan nasional, dan pada periode perang fisik kemerdekaan tersebut, pesantren menjadi pusat-pusat gerilyawan (tentara hizbullah) yang berjuang melawan penjajah. Awal pembentukan Tentara Nasional Indonesia, terutama pada angkatan daratnya, banyak yang berasal dari para santri. Di tingkat pimpinan dan melalui jalur perjuangan diplomasi, tidak sedikit kyai-kyai pengasuh pesantren yang menjadi pimpinan nasional dan ikut serta memberikan andilnya dalam menegakkan kemerdekaan bangsa, melalui penyusunan dasar-dasar konstitusi negara. Bentuk dan sifat pesantren pada waktu itu masih tetap sebagai lembaga pendidikan agama (*tafaqquh fi ad-diin*), sosial keagamaan dan dakwah islamiyah, dengan corak ajarannya yang fikih-sufistik lengkap dengan orientasi ukhrowinya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi, Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981), 242-243.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 148.

Pada awal abad ke-20 Masehi, ilmu-ilmu pengetahuan umum mulai diajarkan di pesantren, dan sejak tahun 1970-an latihan-latihan ketrampilan mengenai berbagai bidang, seperti: jahit menjahit, pertukangan, perbengkelan, peternakan dan sebagainya juga diajarkan di pesantren. Pemberian ketrampilan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk mengembangkan wawasan warga pesantren dari orientasi kehidupan yang amat berat ke akhirat menjadi berimbang dengan kehidupan duniawi. Sebab sebenarnya sejak awalnya santri telah akrab dengan berbagai ketrampilan seperti: pertanian dan pekerjaan-pekerjaan praktis-pragmatis lainnya.

Corak ajaran yang bersifat *fiqih-sufistik* tersebut, membawa santri berperilaku sacral dalam kehidupan sehari-hari dan kepekaan yang luar biasa terhadap kejadian-kejadian yang berkaitan dengan hukum agama (halal-haram, pahala-dosa, wajib-sunnah-makruh, dan sebagainya), sehingga menimbulkan pribadi yang peka terhadap hal-hal yang sifatnya *charitable* atau karitas, dan kurang peka terhadap hal-hal yang bersifat sosial, sekuler, pragmatis dan kalkulatif. Misalnya santri lebih peka terhadap "seekor anjing yang kehausan", atau "duri yang melintang di jalanan", daripada sebuah "tanah longsor" atau "jembatan yang putus" yang menyangkut langsung hajat orang banyak. Sikap karitas yang seperti itu sebenarnya tidak keliru, karena memang agama juga mengajarkan hal-hal yang demikian, tetapi masalahnya adalah bagaimana menundukkan ajaran tersebut secara proporsional sesuai dengan tempat dan masalahnya.

Kemudian dalam masa-masa mutakhir, sejak 20-30 tahun yang lalu, sebagai akibat tantangan yang semakin gencar dari perkembangan dan kemajuan ilmu teknologi, maka kini sudah menjadi pemandangan sehari-hari bahwa di dalam pesantren telah diselenggarakan jenis pendidikan formal, yaitu madrasah dan sekolah umum yang mempelajari ilmu-ilmu umum. Sumber-sumber belajar pun telah berkembang dengan luar biasa, tidak hanya terbatas pada kitab-kitab kuning yang bercorak *fikih-sufistik* tersebut, tetapi telah berkembang pula pada pelajaran-pelajaran filsafat lengkap dengan cabang keilmuannya. Banyak buku tentang filsafat dan pembaharuan pemikiran dalam Islam yang ditulis cendekiawan muslim, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia, memasuki dunia pesantren.

Semua hal tersebut menggambarkan seluruh jaringan sistem pendidikan pesantren telah berubah tidak hanya menyangkut nilai-nilai yang sifatnya mendasar, tetapi juga nilai-nilai instrumental. Yang dimaksud dengan nilai-nilai yang mendasar ialah ajaran yang bersumber pada kitab-kitab klasik, sedang yang dimaksud nilai-nilai instrumental antara lain adalah munculnya lembaga-lembaga pendidikan formal, pergeseran-pergeseran



gaya kepemimpinan, diselenggarakannya *training-training* kepemimpinan, seminar-seminar, penelitian-penelitian dan sebagainya yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan pengembangan proses belajar mengajar di pesantren.

Pada masa kini pesantren sedang berada dalam pergumulan antara "identitas dan keterbukaan", artinya di satu pihak ia dituntut untuk menemukan identitasnya kembali, di pihak lain ia harus secara terbuka bekerja sama dengan sistem-sistem yang lain diluar dirinya yang tidak selalu sepaham dengan dirinya. Kyai mengalami tantangan-tantangan: (1) ia bukan lagi sebagai satu-satunya sumber mencari ilmu dan moral, (2) ia harus bekerja mengatasi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, dan (3) ia harus menghadapi krisis kelembagaan pesantren sebagai tempat ideal untuk mencari ilmu dan mengabdikan, telah berkembang selain menjadi tempat mencari ilmu dan mengabdikan juga sebagai tempat untuk mencari nafkah dan kesempatan untuk meniti karier resmi yang lebih tinggi. Kecuali kyai, ustadz, santri dan orang tua santri juga menghadapi tantangan yang serupa, yang pada dasarnya adalah selain mereka membutuhkan moral dan pengabdian, mereka juga butuh kerja, mengembangkan karier dan mencari nafkah.

Dengan demikian, sejauh ini telah terjadi perubahan-perubahan bentuk, sifat dan fungsi pesantren sebagai berikut:

- A. Semakin jelas batasan-batasan: fungsinya sebagai lembaga pendidikan sosial dan penyiaran agama.
- B. Fungsinya sebagai pendidikan terasa semakin menonjol dibandingkan kedua fungsi yang lain, yang berarti semakin menuju kearah profesionalisme di bidang pendidikan.
- C. Dengan semakin berkembangnya sumber-sumber belajar dan berkembangnya pendidikan formal dalam pesantren, maka semakin beragam (diversifikasi) jenis-jenis pendidikan yang diselenggarakannya, dan semakin menyatu dengan sistem pendidikan nasional.

Kedua jenis pendidikan formal tersebut (madrasah dan sekolah umum) merupakan jembatan bagi santri-santri untuk memasuki sekolah-sekolah formal yang lebih tinggi tingkatannya dalam sistem pendidikan nasional.

Sementara itu, kecenderungan global perkembangan dunia pendidikan dalam budaya industri ini adalah sifatnya yang semakin massif, standard dan rasional. Pendidikan keilmuan akan semakin menonjol di masa-masa mendatang, termasuk ilmu-ilmu agama. Sebagaimana diketahui saat ini, pembagian bidang studi untuk tingkat pendidikan menengah atas: (1) matematika dan fisika, (2) biologi dan kimia, (3) sosial, (4) bahasa dan budaya, (5) agama. Di sini jelas yang dimaksudkan dalam no.5 tersebut adalah ilmu agama. Lembaga-lembaga pendidikan akan semakin didominasi

dengan pekerjaan-pekerjaan untuk mengajarkan dan mengembangkan ilmu daripada mengembangkan nilai-nilai dan kearifan. Tidak semua hal dalam kehidupan kehidupan ini (nilai kearifan) dapat diajarkan dan dididikan melalui lembaga pendidikan formal atau sekolah-sekolah. Guru dapat mengajar filsafat, tetapi ia tidak dapat mengajar kebijakan. Pendidikan nilai dan kearifan akan lebih efektif bila dilakukan melalui jenis pendidikan non formal yang lebur dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana dilakukan oleh pesantren selama ini, di mana sangat ditekankan pentingnya pengamalan ajaran agama dan moral dalam kehidupan sehari-hari.

Gambaran asrama pesantren pada saat ini adalah merupakan tempat tinggal bersama selama 24 jam mata para santri memandang masjid atau surau sebagai tempat ibadah, telinganya selalu mendengar alunan suara bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, mulutnya selalu mengumandangkan suara-suara *istighfar, takbir, tahmid*, puji-pujian *shalawat Nabi*, kaki dan tangannya selalu basah dengan air wudhu dan siap melangkah ke masjid untuk menunaikan shalat, seluruh gerakan langkahnya selalu berlomba dalam mengamalkan agama dan mengharapkan berkah kyai.<sup>27</sup>

Keadaan seperti itu, selain dapat menimbulkan hal-hal positif seperti berkembangnya moral keagamaannya yang baik dan pertahanan mental-spiritual keagamaan yang kuat, juga dapat menghambat perkembangan individualitas (jati diri), karena perilaku individu telah larut kedalam kepribadian kolektif dan dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan kejiwaan lainnya yang tidak diharapkan, seperti hubungan seksual dengan sesama jenis kelamin, sikap tertutup, fanatsisme agama yang sempit, dan sebagainya.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan konsep asrama di masa depan agar pesantren mampu menyatakan kehadirannya sebagai sub sistem pendidikan nasional secara mantap di masa depan. Tampaknya, kebutuhan asrama di masa depan ialah bahwa asrama bukan sekedar tempat hidup bersama selama 24 jam, tetapi asrama hendaknya juga berfungsi sebagai forum studi bersama secara kreatif dan inovatif mampu mengembangkan ilmu, teknologi, agama sesuai dengan tantangan zamannya dan mengembangkan individualitas atau jati diri masing-masing anggotanya yang seimbang dengan perkembangan kepribadian kolektif.

Oleh karena itu, masalah penting bagi konsep "asrama masa depan" bukan terletak pada hidup bersamanya semua anggota dalam suatu tempat secara terus menerus, tetapi adalah pemikiran selama 24 jam untuk merencanakan atau memprogramkan kegiatan-kegiatan pengembangan ilmu

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 149.

dan teknologi yang dipandu oleh moral agama sebagai suatu kesatuan yang diamalkan dalam hidup keseharian. Jadi dengan demikian, asrama juga berfungsi sebagai forum dialog antara murid dan guru dan sesamanya.

Dalam kaitan tersebut, pesantren perlu mengadopsi kultur sistem pendidikan Nasional dalam hal wawasan berpikir keilmuan, meliputi metode berpikir: deduktif, induktif, kausalitas, dan kritis untuk memahami ajaran-ajaran agama secara kontekstual dan mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan umum dan teknologi dalam struktur relevansinya dengan ajaran agama.

Dengan dilaksanakannya sistem madrasah dengan kurikulum 30% agama, 70% umum, dalam kultur dan asrama pesantren menurut konsep asrama baru tersebut diharapkan pesantren dapat menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan dan mengamalkan bidang keahliannya dengan dipandu oleh iman dan taqwa kepada Allah SWT.

Sedang dalam Pesantren Dewasa ini kurikulum pesantren meliputi empat tipe: *ngaji* (mempelajari kitab kuning), pengalaman (pendidikan moral), sekolah (pendidikan umum), serta kursus dan keterampilan.

Dua tipe yang pertama selalu menjadi bagian dari pendidikan pesantren dan membentuk inti identitasnya. Sedangkan dua tipe yang terakhir merefleksikan aspek-aspek baru dari identitas pesantren dan pertemuannya dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.<sup>28</sup>

### **Urgensi Pondok pesantren Dalam UU Sisdiknas 2003**

#### **I. Visi, Misi, Fungsi, Tujuan, Dan Strategi Pendidikan Nasional**

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. UUSPN No. 20 tahun 2003, dilakukan dalam rangka memperbarui visi, misi dan strategi pendidikan nasional. Pembaharuan sistem pendidikan nasional mencakup penghapusan diskriminasi antara pendidikan formal dan pendidikan non-formal.

Visi pendidikan nasional adalah memberdayakan semua warga negara Indonesia, sehingga dapat berkembang menjadi manusia berkualitas yang mampu bersaing dan sekaligus bersanding dalam menjawab tantangan zaman.

Misi pendidikan nasional adalah:

- Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>28</sup> Ahmad Maghfurin, et. Al. *Dinamika Pesantren Dan Madrasah* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2002), 148.

- Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
- Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
- Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
- Memberdayakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks NKRI.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, maka fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik yang menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Strategi pendidikan nasional adalah:

- Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia.
- Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.
- Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
- Evaluasi, akreditasi dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan.
- Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan.
- Penyediaan sarana belajar yang mendidik.
- Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.
- Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata.
- Pelaksanaan wajib belajar.
- Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan.
- Pemberdayaan peran masyarakat.
- Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat.
- Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap perubahan zaman. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 bab II pasal 3.

II. Kelembagaan Dan Pengelolaan Pendidikan

Kelembagaan, program dan pengelolaan pendidikan merupakan bagian dari sistem pendidikan secara keseluruhan.

1. Jalur pendidikan

Dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal.

Pendidikan formal	Pendidikan non-formal	Pendidikan informal
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat pembelajaran di gedung sekolah.</li> <li>- Ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta didik.</li> <li>- Kurikulumnya jelas.</li> <li>- Materi pembelajaran bersifat akademis.</li> <li>- Proses pendidikannya memakan waktu yang lama</li> <li>- Ada ujian formal</li> <li>- Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah atau swasta.</li> <li>- Tenaga pengajar memiliki klasifikasi tertentu.</li> <li>- Diselenggarakan dengan administrasi yang seragam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat pembelajarannya bisa di luar gedung</li> <li>- Kadang tidak ada persyaratan khusus.</li> <li>- Umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas.</li> <li>- Adanya program tertentu yang khusus hendak ditangani.</li> <li>- Bersifat praktis dan khusus.</li> <li>- Pendidikannya berlangsung singkat</li> <li>- Terkadang ada ujian</li> <li>- Dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat pembelajaran bisa di mana saja.</li> <li>- Tidak ada persyaratan</li> <li>- Tidak berjenjang</li> <li>- Tidak ada program yang direncanakan secara formal</li> <li>- Tidak ada materi tertentu yang harus tersaji secara formal.</li> <li>- Tidak ada ujian.</li> <li>- Tidak ada lembaga sebagai penyelenggara.</li> </ul>

2. Jenjang pendidikan

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan. Menurut UU No. 20 tahun 2003 pasal 14, jenjang pendidikan formal terdiri atas:

Pendidikan dasar (SD, MI dan SMP, MTS)

↓

Pendidikan menengah (SMA, MA, SMK, MAK)

↓

Pendidikan tinggi (akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas)

### 3. Jenis pendidikan

Pendidikan Pondok Pesantren dapat masuk dan digolongkan dalam jenis Pendidikan Keagamaan sebagaimana Menurut UU No. 20 tahun 2003 pasal 15, mencakup: Pendidikan umum, Pendidikan kejuruan, Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, Pendidikan vokasi, dan Pendidikan keagamaan, serta Pendidikan khusus. Sementara yang dimaksud dengan Pendidikan keagamaan, Pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama.<sup>29</sup>

### 4. Kurikulum

Ketentuan mengenai kurikulum diatur dalam UU no.20 tahun 2003 pasal 36, 37, dan 38.

Pasal 36: (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.

(3) Kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan:

- a. Peningkatan iman dan taqwa.
- b. Peningkatan akhlak mulia.
- c. Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik.
- d. Keragaman potensi daerah dan nasional.
- e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
- f. Tuntutan dunia kerja.
- g. Perkembangan ipteks.
- h. Agama.
- i. dinamika perkembangan global.
- j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

---

<sup>29</sup> [www.dikti.go.id/files/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf](http://www.dikti.go.id/files/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf).

Pasal 37: (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: Pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni dan budaya, Pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, muatan lokal.

Pasal 38: (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah.

(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah.

(3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk setiap program studi.

(4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk setiap program studi.

### III. Posisi Pondok Pesantren Pada UU No 20 Sisdiknas 2003.

Adapun posisi pondok pesantren sebagai wahana pendidikan keagamaan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional antara lain ssebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat 1 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pasal 1 ayat 2 Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Pasal 1 ayat 16 Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berbasis agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 dan 16 diatas sangat jelas bahwa pendidikan, pendidikan nasional dan pendidikan berbasis masyarakat berakar dan bersumber pada pengembangan agama yang kesemuanya menjadi tradisi dan kebudayaan dalam pondok pesantren yang merupakan pendidikan berbasis masyarakat.

4. Pasal 3 Tujuan Pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan ini dapat tercapai melalui pendidikan keagamaan yang maksimal, maka pondok pesantren menjadi salah satu lembaga pendidikan yang dapat mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan yang dimaksud.
5. Pasal 17 dan 18 tentang pendidikan dasar dan menengah mengatur tentang lembaga pendidikan termasuk Madrasah dalam setiap jenjang. Pelaksanaan pendidikan dengan menggunakan jenjang pendidikan dalam bentuk madrasah banyak pula diselenggarakan oleh pesantren.
6. Pasal 30, khusus menyangkut pendidikan keagamaan yang terdiri dari 5 ayat dan salah satu ayatnya yaitu ayat 4 secara eksplisit menyebutkan lembaga pesantren sebagai bagian dari pendidikan nasional yaitu: Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, aqsraman, pabhaja samanera dan bentuk lain yang sejenis.
7. Pasal 36 tentang kurikulum, dimana dasar penyusunan kurikulum pada ayat 3 pasal 36 poin a) harus memperhatikan peningkatan iman dan takwa serta poin h) agama.
8. Pasal 37 tentang muatan atau isi kurikulum yang wajib memuat pendidikan agama. Penjelasan pasal tersebut dalam tambahan lembaran negara RI dinyatakan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membantu peserta didik menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkhlah mulia.<sup>30</sup>

Dengan dinyatakannya pendidikan keagamaan secara umum dan pendidikan pesantren secara khusus dalam UU sisdiknas tersebut, maka dengan mudah Pesantren bisa menggolongkan sistem pendidikannya dalam kelompok MI, MTs. Atau MAK, dan ini dibuktikan dengan diakuinya ijasah-ijazah lulusan pesantren sebagai setara dengan sekolah formal dari MI sampai MA sehingga out put pesantren saat ini bisa diterima di Universitas atau sekolah tinggi Islam diIndonesia.

## Penutup

Undang-undang Yang membahas sistem pendidikan nasional, terlihat jelas dapat dijadikan payung bagi pengembangan Pendidikan di Pondok Pesantren, yang mana pesantren sejatinya dengan pelajar berasrama maka berarti masa pendidikan yang bisa mencapai hampir 24 jam bagi pendidikan. Pesantren akan tetap eksis, namun harus diakui perlu terus berusaha

---

<sup>30</sup> Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam UU Sisdiknas* (Jakarta : Ditjen kelembagaan Agama Islam Depag, cet III, 2003), 33-87.



berinovasi dalam rangka mengikuti perkembangan zaman. Perencanaan yang baik harus memuat beberapa komponen, diantaranya adalah visi dan misi yang memberikan arah sekaligus motivasi serta kekuatan gerak bagi seluruh jajaran yang terlibat langsung dalam pengembangan pendidikan. Selain itu visis dan misi juga dipandang sangat penting untuk menyatukan persepsi, pandangan, cita-cita, harapan-harapan dan bahkan impian-impian semua pihak yang terlibat di dalamnya.. Oleh karena itu diperlukan rumusan visi dan misi yang jelas yang diharapkan dapat memberikan motivasi dan kekuatan gerak untuk mencapai prestasi menuju pendidikan pondok pesantren masa depan dengan berbagai keunggulannya.

### **Daftar Rujukan**

- A.Timur Djailani, *Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Pengembangan Perguruan Agama*, Jakarta: Dermaga.
- Abdur Rahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren*, Jakarta: Darma Bakti.
- Ahmad Maghfurin, et. Al, *Dinamika Pesantren Dan Madrasah*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2002.
- Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Pendidikan Agama*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1992.
- Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam UU Sisdiknas*, Cet. III, Jakarta : Ditjen kelembagaan Agama Islam Depag, 2003.
- Nurcholis Madjid, *Islam Kemoderenan dan Ke-Indonesiaan*, Bandung: Penerbit Mizan 1988 .
- Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah, Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Cet. Kedua April 1994.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1993.
- Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Jakarta: Mizan 1995.
- Mastuhu, *Dinamika Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994
- Moh. Hasyim Munif, *Pondok Pesantren Dalam Kancah Kemerdekaan dan Pembangunan Pedesaan*, Surabaya: Sinar Wijaya, 1992

Soedjoko Prasodjo dkk., *Profil Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1973.

[www.dikti.go.id/files/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf](http://www.dikti.go.id/files/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf).

Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1985.